

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia disaat ini tengah melaksanakan proses pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat baik sebagai modal guna melaksanakan proses pembangunan. Negara Indonesia mempunyai indikator buat mengukur hasil sebagai upaya menciptakan kualitas kehidupan manusia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun *Human Development Index* (HDI). (Rosyadah, 2020).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sesuatu sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia yang dapat dijelaskan bagaimana penduduk bisa mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. IPM kali pertama diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1990. Sejak saat diperkenalkan UNDP sampai sekarang, IPM dipublikasi secara periodik dalam laporan tahunan *Human development Report* (HDR). (BPS, 2018)

Panjang umur dan sehat, pengetahuan, dan tingkat hidup yang baik adalah tiga karakteristik inti dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Harapan hidup saat lahir (AHH), yang merupakan harapan hidup untuk bayi baru lahir, digunakan untuk mewakili hidup yang panjang dan sehat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pola kematian menurut umur saat lahir adalah konsisten sepanjang hidup bayi. Rata-rata tahun pendidikan dan tahun prediksi indikator pendidikan digunakan untuk menilai pengetahuan. Rata-rata lama sekolah formal (tahun) bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas dikenal sebagai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sekolah Lama Harapan (SLTA) didefinisikan sebagai pendidikan formal (tahun) yang akan diperoleh seorang anak ketika mencapai usia tertentu di masa depan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang didasarkan pada pengeluaran per kapita dan paritas daya beli, menunjukkan tingkat kehidupan yang wajar. (BPS, 2020). Faktor taraf hidup yang layak juga berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Menurut hasil riset yang dicoba oleh Burhanudin(2015) mengenai hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkatan pengangguran mengikhtisarkan jika indeks pembangunan manusia mempunyai

pengaruh yang signifikan serta negatif terhadap tingkatan pengangguran. Perihal ini bisa dipaparkan kalau semakin besar angka indeks pembangunan manusia pada suatu daerah sehingga akan menimbulkan tingkatan pengangguran semakin menurun dan kebalikannya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berakibat pada tingginya tingkatan pengangguran di suatu daerah.

Dengan 34 provinsi, Indonesia pasti menyediakan berbagai profil pembangunan manusia. IPM Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data BPS, IPM Indonesia pada tahun 2019 sebesar 71,92 dan mengalami peningkatan sebesar 0,02 sehingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,94. Pada tahun 2021 IPM Indonesia menjadi 72,29 yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 0,35 dari tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar ini dapat mengindikasikan bahwa penduduk Indonesia mulai mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun disisi lain terdapat beberapa wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang banyak tetapi memiliki besaran IPM dibawah rata-rata IPM Indonesia. Salah satu pulau dengan sumber daya manusia yang tinggi yaitu pulau jawa.

Pulau jawa memiliki enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timut. Berdasarkan data BPS, terdapat empat provinsi dengan besaran IPM tahun 2021 yang berada diatas rata-rata IPM Indonesia yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Barat. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan dua provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia maupun di pulau jawa yang masing-masing IPM sebesar 81,11, dan 80,22 Banten dan Jawa Barat juga memiliki IPM diatas rata-rata IPM Indonesia dengan besaran masing-masing 72,72, dan 72,45. Akan tetapi terdapat dua provinsi dengan IPM yang berada di bawah rata-rata IPM Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan IPM sebesar 72,16, dan 72,14. Dari kedua provinsi dengan IPM terendah di pulau jawa dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki IPM yang lebih rendah 0,02 dari Provinsi Jawa Tengah dan lebih rendah 0,15 dari IPM Indonesia.

Ada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 17 kabupaten/kota tersebut memiliki IPM yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo merupakan empat dari 17 kabupaten/kota dengan IPM di atas rata-rata nasional. Sementara itu, 13 dari 21 kabupaten/kota dengan IPM di

bawah rata-rata nasional ditetapkan sebagai “Sedang”. Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sampang termasuk kabupaten yang “sedang”. Kabupaten/kota yang tersisa berstatus “Tinggi”, sedangkan tidak ada kabupaten/kota yang berstatus “Rendah”. (BPS, 2021).

Ada sebagian riset yang mangulas mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memakai analisis Geographically Weighted Regression (GWR). Penelitian Farida tentang analisis IPM yang bertajuk “Geographically Weighted Regression (GWR) Model With Bisquare Kernel Weighting: Kesulitan Penelitian: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2013 di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat”, menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat heterogenitas spasial permasalahan IPM di kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat, maka pemodelan menggunakan GWR dilanjutkan dan diperoleh elemen-elemen yang berpengaruh signifikan. Kelebihan model GWR dibandingkan dengan model klasik adalah GWR mampu memberikan model secara lokal.

Berdasarkan justifikasi tersebut, peneliti akan melakukan penelitian sejenis terkait pemodelan IPM menggunakan metode GWR secara khusus di Provinsi Jawa Timur dengan data *cross section* tahun 2021. Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata Lama Sekolah (RLS), persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pendapatan perkapita merupakan enam variabel prediktor yang digunakan. Pendekatan GWR memerlukan mengubah teori *Ordinary Least Square* (OLS) menjadi model regresi berbobot dengan memantau efek geografis untuk menghasilkan penduga parameter yang hanya dapat digunakan untuk meramalkan setiap titik atau tempat di mana data dilihat dan disimpulkan. Akibatnya, menganggap geografi sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel respon. Untuk setiap titik atau posisi di mana data terlihat, model GWR akan menyediakan penduga parameter model lokal. Pemilihan metode analisis yang tepat diharapkan dapat menghasilkan model yang tepat pula, sehingga pemodelan terkait IPM di Provinsi Jawa

Timur dapat dijadikan acuan bagi pemerintah atau instansi setempat untuk membuat kebijakan terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dirumuskan sebagai berikut, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya:

1. Bagaimana mendeskripsikan variabel-variabel penelitian terkait IPM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021?
2. Bagaimana memodelkan IPM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 menggunakan Metode GWR?
3. Bagaimana menganalisis dan intepretasi hasil pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR) pada Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur berdasarkan kabupaten/kota tahun 2021 dengan menggunakan peta tematik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya:

1. Mendeskripsikan faktor prediktor pemodelan IPM dan variabel respon di Provinsi Jawa Timur.
2. Memodelkan IPM di Jawa Timur berdasarkan metode GWR
3. Menganalisis hasil pemodelan *Geographically Weighted Regression* (GWR) pada data Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2021 dengan menggunakan peta tematik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Masyarakat
Menjadi wawasan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui IPM di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi Perkembangan Keilmuan

Sebagai salah satu refrensi bagi peneliti lain mengenai pengaplikasian pemodelan metode GWR pada IPM di Provinsi Jawa timur.